

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan masyarakat

1. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. *Daya* artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan *pe-* dengan mendapat sisipan *-m-* dan akhiran *-an* menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.¹

Kata “pemberdayaan ” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “*em*” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.²

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan)³. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga

¹Rosmedi Dan Riza Risianti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), Hlm. 1

²Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED)

³Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, Hlm.57

mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka⁴.

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung⁵. Masih dalam buku tersebut, person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat, pemberdayaan

⁴*Ibid*, Hlm 58

⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*(Bandung: Ptrevika Aditam, 2005) Cet Ke-1, Hlm 57

menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial⁶.

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya⁷. Adapun cara yang di tempuh dalam malakuakan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

2. Pemberdayaan menurut Islam

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*, Hlm. 60

dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam Jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.⁸

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penguatan, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan⁹. Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan *dhu'afa*, "*community empowerment*" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya¹⁰.

⁸ Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, Hlm 427

⁹ Agus Ahmad Syarfi; I, *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), Hlm.70

¹⁰ Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa* (Jakarta: Dakwah Press) Cet Ke-1, Hlm. 9

Masih dalam pengalaman Al-Qur'an, Jim Iffendy mengatakan bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka yang lebih baik¹¹. Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumohardjodiningrat adalah "upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum *dhu'afa* dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk mengembangkannya"¹².

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam*, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif "Barat" yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan desain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.¹³

¹¹ *Ibid*, Hlm 9

¹² Gunawan Sumohardjodiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*, (Jakarta, Bina Rena Pariwisata, 1997), Hlm. 165.

¹³ Dian Iskandar Jaelani, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*, Eksyar, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014: 018-034, hlm 19

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual *an sich*.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur'an telah menyinggung dalam surat Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سُلْحِمًا وَمِنَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf: 32).*¹⁴

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk salingmembantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧

Artinya: *“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk Kota-Kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya” (Al-Hasyr: 7).*¹⁵

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai

¹⁴Al-Quran surat Az-Zukhruf, ayat 32

¹⁵Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7.

“Kemiskinan absolut” sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (*kaffah*) ayat-ayat Tuhan tadi.

Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “Menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “Penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara. Demikian pula, di dalam mengatasi *problematika* tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat 13 :11

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ...

Artinya

: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)¹⁶. Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.¹⁷

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya¹⁸.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Press, 1987), Cet. Ke-2, Hlm. 75

¹⁷*Op. Cit*, Edi Sueharto, Hlm. 60

¹⁸*Ibid*, Hlm. 60

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya¹⁹.

4. Tahapan pemberdayaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

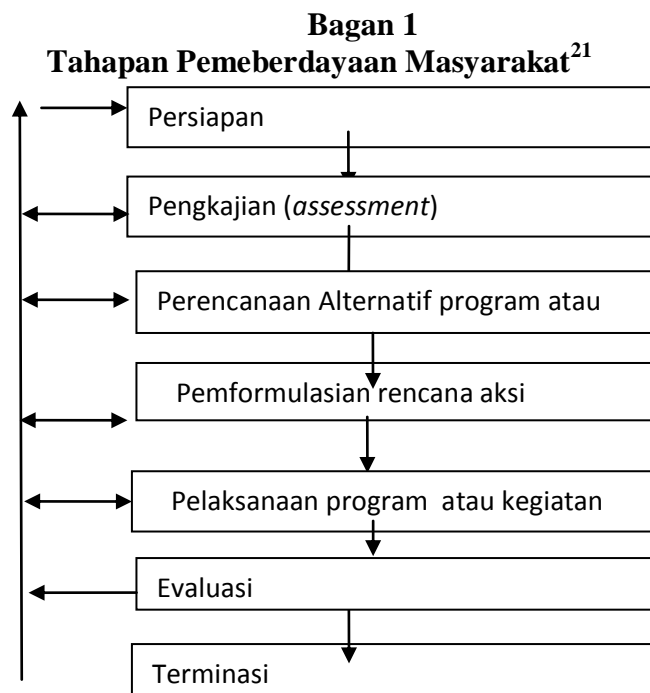
- a. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

¹⁹*Op. Cit*, Agus Ahmad Syafi'i, Hlm. 39

- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap pemfomalisasi rencanaaksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- e. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peren masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.
- f. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan

warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengewasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

- g. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.²⁰ Adapun bagan dari model tahapan pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:



Sumber: Adi Isbandi Rukminto

Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat, upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

²⁰ *Ibid*, Hlm. 63

²¹ Adi Isbandi Rukminto, *Op. Cit*, Hlm. 54

- 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- 3) Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi²².

B. Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan bagi perempuan dapat dilakukan dengan cara memberdayakan kaum perempuan yang lemah dan menciptakan hubungan yang lebih adil, setara antara laki-laki dan perempuan serta mengikutsertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Moser, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan praktis, yaitu dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi baik perempuan maupun laki-laki dan melalui pemenuhan kebutuhan strategis, yaitu dengan melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan. Pemenuhan kebutuhan praktis dapat

²²*Ibid*, Hlm. 53

dilakukan dengan cara peningkatan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi). Sedangkan pemenuhan kebutuhan strategis dapat dilakukan dengan cara memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis perempuan melalui peningkatan kapasitas kader-kader perempuan.²³

2. Indikator Pemberdayaan perempuan

Bagi perempuan miskin (WRSE) setelah melalui berbagai upaya pemberdayaan, dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai 3 indikator yaitu:

- a. indikator keluaran (*output indicator*) di tandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap sejumlah perempuan miskin (WRSE).
- b. Indikator hasil (*income indicator*) ditandai dengan perempuan miskin (WRSE) yang di berdayakan telah mampu berusaha ekonomi produktif sesuai keterampilan mereka.
- c. Indikator dampak (*impact indicator*) ditandai dengan perempuan miskin (WRSE) yang di berdayakan telah mampu mengembangkan usaha, berorganisasi/bermasyarakat dan membantu perempuan lain yang masih miskin.²⁴

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) tidak saja di tuntutan untuk memiliki keberdayaan secara ekonomi, akan tetapi tidak kalah penting memiliki keberdayaan secara sosial. Seperti yang di kemukakan oleh

²³Titik sumarti, "strategi nafkah rumah tangga dan posisi perempuan" dalam *secercah cahaya menuju kesejahteraan perempuan (sebuah kajian)*, kementerian sosial RI direktorat jendral pem,berdayaan keluarga, 2010, hlm. 212

²⁴*Ibid, Hlm.292*

Lorrancaine Guitierrez, keberdayaan di tandai dengan peningkatan kemampuan yaitu: kemampuan personal, interpersonal dan politik. Kemampuan personal adalah kemampuan individu dalam memahami kekuatan yang di milikinya. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan individu dalam mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuatan sosialnya. Sedangkan kemampuan politik adalah kemampuan dalam mengambil keputusan bersama secara formal maupun informal.²⁵

Namun lebih dari itu semua adalah terciptanya pola pikir dan paradigma yang *egaliter*. Perempuan harus dapat berperan aktif dalam beberapa kegiatan yang memang proporsinya. Jikalau itu semua telah terealisasi, maka perempuan benar-benar terberdayakan.

3. Strategi pemberdayaan perempuan

strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Menguatkan, memfasilitasi dan menjembatani Sektor, LSM dan Perguruan Tinggi dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi di tingkat pusat dan daerah.
- b. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan mengelola dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial dan ekonomi.
- c. Meningkatkan dan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja (*net working*)²⁶

²⁵Rokma Murni ,”pemberdayaan perempuan pasca reformasi” dalam secercah cahaya menuju kesejahteraan perempuan (sebuah kajian), kementerian sosial RI Direktorat jendral pemberdayaan sosial direktorat pemberdayaan keluarga (tkp:2010) hlm, 333

²⁶Sulikanti Agusti,*kebijakan dan strategi peningkatan produktifitas ekonomi perempuan*, Kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak Republik Indosesia, hlm. 25

Memperhatikan karakteristik kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan serta arahan kebijakan dalam proses pemberdayaannya, maka pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan hendaknya dilakukan dengan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

a. Program pemberdayaan harus spesifik sesuai kebutuhan

kelompok sasaran: Kemiskinan yang dialami kaum perempuan serta masyarakat memiliki keragaman karakteristik yang melatarbelakanginya. Untuk itu, agar program pemberdayaan perempuan dapat berlangsung efektif, maka muatan program pemberdayaan haruslah sesuai dengan karakteristik kondisi dan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran program. Permasalahan kelompok perempuan miskin di perkotaan, pada aspek tertentu memiliki perbedaan dengan permasalahan kelompok perempuan miskin di perdesaan. Perbedaan atau karakteristik yang khas juga ditemui dalam konteks kondisi dan permasalahan kemiskinan di kalangan perempuan petani, perempuan nelayan, atau perempuan yang bergelut dalam sektor industri pengolahan (baik sebagai buruh maupun pengusaha mikro-kecil). Konsekuensinya, muatan program pemberdayaan perempuan tidak dapat digeneralisir, namun harus disusun secara spesifik sesuai dengan kelompok sarannya.

b. Pengembangan kelembagan keuangan mikro tingkat lokal:

Sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem dana bergulir dalam proses pemberian bantuan modal kerja, maka akan dibutuhkan adanya

lembaga pengelolaan dana, ini dapat pula menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkonsultasi dalam meningkatkan usaha mereka, lembaga penampung dan membantu proses pemasaran hasil produksi dan pasar, serta mediator dalam upaya pengembangan jaringan kemitraan dan pemasaran yang lebih luas.

c. Penyediaan modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi

produktif: Pada beberapa kelompok sasaran, mungkin akan dibutuhkan bantuan penyediaan modal awal untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Hal ini karena kelompok sasaran benar-benar miskin dalam arti tidak memiliki barang modal yang dapat dipergunakan untuk memulai kegiatan usahanya (seperti kelompok buruh tani, dll). Modal awal ini dapat berupa tanah/lahan atau alat produksi. Perlu dihindari penyediaan modal awal dalam wujud uang tunai.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang

berkesinambungan:. Kegiatan ekonomi ini dapat merupakan pengembangan lapangan usaha yang memang telah dilaksanakan kelompok sasaran sebelumnya (sepanjang masih layak secara ekonomis) maupun pengembangan lapangan usaha baru. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan hendaknya didukung oleh potensi ketersediaan bahan baku dan bahan pendukung di wilayah tersebut, merupakan produk unggulan di daerahnya (bersifat komparatif

maupun kompetitif), serta dibutuhkan dan memiliki pasar yang nyata (demand and market driven) agar berkesinambungan.

- e. **Keterpaduan peranserta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders):** Proses pemberdayaan perempuan membutuhkan adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) secara terpadu, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, LSM, dan dunia usaha. Di tingkat pemerintahan, proses ini membutuhkan dukungan secara lintas sektoral baik di tingkat pusat, provinsi, dan kab/kodya
- f. **Penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha:** Penyediaan dan peningkatan kemudahan untuk memperoleh akses terhadap sumber permodalan sangat diperlukan mengingat masih terbatas dan lemahnya akses yang dimiliki pengusaha mikro dan kecil pada umumnya (apalagi yang baru memulai usahanya) untuk memperoleh bantuan (kredit) modal kerja dari sumber-sumber modal yang ada.
- g. **Fasilitasi bantuan permodalan untuk pemupukan permodalan wilayah:** Dana ini sifatnya merupakan dana hibah, kelompok penerima tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kepada pengelola untuk kemudian digulirkan kepada kelompok perempuan miskin lainnya. Cara ini akan lebih menjamin pelaksanaan program secara berkelanjutan sekaligus lebih mencerminkan prinsip keadilan bagi kelompok perempuan miskin lain yang belum menerima dana

modal kerja ini (mengingat pada saatnya mereka akan menerima bantuan modal kerja sesuai tahap perguliran yang berlangsung).

h. Pemantapan sistem pendampingan untuk kemandirian kelompok:

Sistem Pendampingan ini bersifat mandiri dan telah berjalan baik yang dilakukan oleh relawan, LSM, Perguruan Tinggi atau petugas pemerintah. Petugas Pendamping ini adalah anggota masyarakat (infrasuktrur), LSM, Organisasi Sosial, Yayasan, Lembaga Kekerabatan, dll yang memiliki pengetahuan dan kemampuan atau memiliki kapasitas dan kapabilitas serta diterima masyarakat sebagai pembimbingan dan pendampingan.²⁷

4. Pemberdayaan Perempuan Melalui Usaha ekonomi produktif

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menurut Peraturan Direktorat Jendral Pemberdayaan Departemen Keuangan RI no.per-19/PB/2005 tentang petunjuk penyaluran dana bantuan modal usaha bagi keluarga binaan sosial program pemberdayaan fakir miskin melalui pola pengembangan terpadu klompok usaha bersama(KUBE) dan lembaga keuangan Mikro (LKM) mendefinisikan usaha ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumberdaya ekonomi, meningkatkan

²⁷*Ibid, hlm. 26-28*

produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.²⁸

Usaha ekonomi produktif (UEP) adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan sosial yang dikembangkan Departemen Sosial Republik Indonesia dalam perspektif yang lebih luas merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pemerintah dalam upaya menggerakkan ekonomi keluarga dan komunitas, khususnya dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan, atau dalam istilah Ismawan, dikenal sebagai ekonomi kerakyatan.

Kegiatan-kegiatan yang digeluti pelaku ekonomi rakyat menurut Kethi, secara kasar dapat dikelompokkan menjadi

- a. Kegiatan primer dan sekunder: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, (semua dilakukan dalam skala terbesar dan susten), pengerajin kecil, penjahit, makanan kecil, dan sebagainya
- b. Kegiatan-kegiatan tersier: transportasi, kegiatan sewa-menyewa baik perumahan, tanah, maupun alat produksi.
- c. Kegiatan-kegiatan distribusi: pedagang dan jenis usaha lainnya.
- d. Kegiatan-kegiatan jasa lain, pengeman, penyemir sepatu, tukang cukur, montir, tukang sampah, juru potret, juru potret jalanan, dan sebagainya

Meningkat usaha ekonomi produktif merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan yang mempunyai fungsi strategis dalam memperkaut

²⁸ direktorat jendral pemberdayaan departemen keuangan RI no.per-19/PB/2005 *tentang petunjuk penyaluran dana bantuan modal usaha*, Direktorat Jendral RI, hlm. 12

ekonomi keluarga dan komunitas maka upaya pemberdayaannya suatu tuntutan yang harus di wujudkan. Pemberdayaan usaha kecil tersebut menjadi salah satu pilihan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.

C. Kesejahteraan masyarakat Secara Umum

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.²⁹

kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang , tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tertram dan hatinya terpelihatara, ia merasa keadilan ada dalm hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.³⁰

Dalam praktisnya, kesejahteraan tidak terlepas dari keadaan, kondisi, ilmu, atau gerakan tertentu tentang kemasyarakatan atau sosial. Sehingga kesejahteraan dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang sering digunakan dalam berbagai bahasan. Disisi lain, untuk menggunakan istilah “kesejahteraan masyarakat” dalam menganalisa permasalahan maka diperlukan pemahaman mengenai istilah tersebut secara teoritis.³¹

²⁹Astriana Widyastusi, Analisi Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tngah Tahun 2009”, Ekonomik Development Analisis Journal, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negrisemarang , Indonesia 2012.

³⁰Anwar Abbas, Bunghatta Dan Ekopnomi Islam, Jakarta, Multi Press Iondo, 2008, Hlm.126

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), H. 270

Dalam usaha mendeskripsikan tingkat kesejahteraan itu, tidak lepas dari penggolongan keluarga sejahtera. Sehingga keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya yang utama dan pertama. Untuk mendapat gambaran tentang klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkat keluarga kesejahteraan.

Langkah pertama terkait hal tersebut adalah konteks definisi yang merupakan batasan tertentu agar pemahaman dapat fokus dan mudah dimengerti. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa definisi kesejahteraan sosial yang terkait dengan sudut pandang penelitian:

Pengertian berdasarkan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1974 Tentang ketentuan ketentuan pokok kesejahteraan sosial, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai:

*Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara yang mengandalkan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.*³²

*Menurut Rambe kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusialaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.*³³

³²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 2

³³ Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera Sejarah Dan pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutan*, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, ISBN 978-602-8665-05-6, Hlm.15

Sedangkan menurut bubolz dan sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terelisasikannya nilai-nilai hidup.³⁴

*Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Suud (2006) “kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga social yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya”.*³⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan proses kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu program pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi masyarakat miskin dapat membantu kemandirian dan pendapatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Pinjaman dana bergulir dan bantuan dana yang digunakan masyarakat Kecamatan Way Halim Bandar Lampung adalah salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya pemberian modal dan pinjaman modal usaha tersebut masyarakat bisa mengembangkan usaha yang telah ada menjadi lebih baik. Apabila usaha mereka menjadi

³⁴*Ibid.*, Hlm.15

³⁵Nova Marida Sisika, Dkk, *Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*, 138, Seminar Nasional Industri Dan Teknologi, Volume 2, Nomor 1, Desember 2013, Hlm. 138 - 145

lebih baik otomatis kondisi keuangan mereka akan meningkat dan pastinya akan terjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Indikator kesejahteraan masyarakat

Menurut Sukirno, kesejahteraan masyarakat hanya dapat diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidak sempurnaan Ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu Backerman membedakan indikator masyarakat dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang di pelopori Collin Clark, Gilbert dan Kravis.
- b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi.

United nations development programe (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan, laporan ini menganggap bahwa

pembangunan manusia pada hakikatnya adalah suatu proses mamperbesar pilihan–pilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan *human development index (HDI)* atau indeks pembangunan manusia (IPM).³⁶

Human development index merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah, indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. salah satu keuntungan HDI adalah , indeks yang yang mengungkapkan bahwa sebuah negara/daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar adalah tingkat pendapatan relative kecil dalam pembangunan manusia, HDI juga menyampaikan bahwa pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi indikator kesejahteraan pembangunan dan peningkatan yang baik harus memasukan variabel kesehatan dan pendidikan dalam pengukuran kesejahteraan yang tertimbang, dan bukan hanya melihat tingkat pendapatan saja. HDI merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah.³⁷

³⁶Hadi Sasana ,” Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Antar daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal’, Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, Vol.16 , No. 1, Maret 2009 Hlm 55

³⁷*Ibid*, Hlm 55

Sedangkan menurut Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada pula yang menakar kesejahteraan bisa dicermati dari ukuran sebagai berikut:

- a. Asupan gizi yang diterima penduduk dapat dilihat dari index gizi nasional. Indonesia termasuk kategori negara yang abai dalam hal ini. Bahkan, kasus malnutrisi (kekurangan gizi) bukan hanya menjangkiti warga miskin, melainkan warga yang relatif kaya,
- b. Jika merujuk teori motivasi Maslow. Rumah adalah kebutuhan utama yang harus terpenuhi sebelum menginjak tangga selanjutnya. Memiliki rumah berarti memiliki tempat bermukim. Bisa dibayangkan jika kehilangan rumah. Menjadi gelandangan, numpang, dan sewa rumah adalah pilihan utama,
- c. Dari ukuran yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, membeli pakaian baru dalam hitungan tahun masuk dalam penilaian apakah seseorang *the have* atau *have not*,
- d. Pendidikan merupakan kunci untuk menjadi sejahtera. Pendidikan yang dienyam oleh warga menjadi ukuran kesejahteraan. Terbukti bahwa kebanyakan warga Indonesia tidak bisa mencicipi perguruan tinggi. Mayoritas masyarakat berhenti di Sekolah Menengah Atas (SMA), Adapula yang membuat indikator dalam penelitian tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.³⁸

Kesejahteraan manusia hanya dapat diukur berdasarkan perhitungan fisik, namun non-fisik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, tingkat

³⁸BPS, *Op.Cit.* Hlm 13

konsumsi per kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilisasi, ekonomi, dan akses di media masa. Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, selain menggunakan IPM juga menggunakan indikator kesejahteraan sosial (*nonmoneter*) lainnya.³⁹

Indikator berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Pengelompokan lima jenis keluarga sejahtera menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 1992 sebagai berikut⁴⁰:

a. Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah, yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.

b. Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga-keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makanan,

³⁹*Ibid*, Hlm 56

⁴⁰BKKBN, *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2012 (jakarta:2013)*, hlm.3

pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana.

- 1) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- 2) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 3) Bagian yang terluas dari rumah bukan dari tanah.
- 4) Bila anak sakit dibawa ke seorang petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.
- 5) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianutnya.

c. Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (*developmental needs*), seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi. Sehingga harus memenuhi syarat 1 - 5, maka keluarga tersebut harus memenuhi syarat 6 - 13 sebagai berikut ⁴¹:

- 6) Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan /telur/sebagai lauk pauk.

⁴¹*Ibid*, hlm.4

- 7) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir.
- 8) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah.
- 9) Seluruh anggota keluarga yang berumur dibawah 60 tahun dewasa ini bisa membaca tulisan latin.
- 10) Seluruh anak usia 6-12 tahun bersekolah pada saat ini.
- 11) Paling kurang satu orang anggota keluarga berumur 15 tahun keatas mempunyai pekerjaan tetap.
- 12) Seluruh anggota keluarga dalam sebulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- 13) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.

d. Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti memberikan sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat, dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta berperanserta

secara aktif, seperti menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya. Keluarga yang memenuhi syarat 1 – 13 dan memenuhi syarat-syarat dibawah ini juga harus memenuhi syarat-syarat 14 - 21 sebagai berikut :

- 14) Anak hidup paling banyak dua orang, atau anak lebih dari dua masih pasangan Usia subur memakai kontrasepsi saat ini.
- 15) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- 16) Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari.
- 17) Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal.
- 18) Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan.
- 19) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/TV atau majalah.
- 20) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- 21) Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis,

pengembangan serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

22) Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan sebagai kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.

23) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan yayasan atau institusi masyarakat lainnya.⁴²

Dari penjabaran dan pengklasifikasi di atas maka dapat disimpulkan indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein, semakin besar tingkat gizi yang dikonsumsi menandakan semakin tinggi tingkatan kesejahteraan suatu keluarga.
- b. Sedang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki dan alas kepala.⁴³
- c. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang dan air.
- d. Pendidikan, mengenai pendidikan, mengenai pendidikan, pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Menurut BPS, indeks pendidikan diawali dengan sector pendidikan dan

⁴² Sumber : Lembar Informasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Buton ; 1996

⁴³ Sub Direktorat Analisis Statistik dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008 (Jakarta, : Badan Pusat Statistik, 2008) hlm. 12

merupakan salah satu komponen yang mendikasikan pembangunan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan merupakan manifestasi yang sangat jelas dari perbaikan kondisi hidup masyarakat pada suatu daerah sehingga pendidikan yang lebih baik akan mendorong perbaikan kondisi sektor-sektor lain. Karakteristik pendidikan ini diwakili oleh komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.⁴⁴ Pendidikan yang diperlukan menurut Philip H. Coombs seorang tipologi ekonomi pendidikan mencakup empat kelompok⁴⁵:

- 1) Pendidikan umum dan pendidikan dasar, baca tulis, hitung dan pengetahuan elementer tentang sains dan lingkungan hidup yang oleh kebanyakan sekolah dasar dan menengah pada umumnya ingin dicapai.
- 2) Pendidikan kesejahteraan keluarga, dimaksudkan untuk mendalami pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang berguna untuk memperbaiki kualitas hidup keluarganya, termasuk kesehatan dan nutrisi, rumah yang sehat dan perawatan anak, membangun rumah dan perbaikannya, keluarga berencana dan sebagainya.
- 3) Pendidikan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk memperkuat lembaga-lembaga kemasyarakatan baik lokal

⁴⁴Rudi Badrudin, *Op.Cit*, hlm.159

⁴⁵Suryana, *Ekonomi pembangunan, problematika dan pendekatan*, (Jakarta: Salemba Empat,2000)hlm.86

maupun nasional, koperasi, proyek-proyek kemasyarakatan dan yang serupa.

- 4) Pendidikan keterampilan kerja, dimaksud untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan khusus yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan yang bermanfaat bagi usaha membina kehidupan. Program-program pendidikan yang efektif dan diatur dengan baik serta cocok untuk semua pekerjaan adalah sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan desa.
- e. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan di rumah, setidaknya bila anggota keluarga sakit dapat dibawa ke Puskesmas.
- f. Pendapatan dan pengeluaran

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi di suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita perbulan suatu rumah tangga.⁴⁶ Pengeluaran yang besar akan seimbang apabila dibarengi dengan pendapatan yang tinggi, begitupun sebaliknya pendapatan yang rendah akan mengakibatkan pengeluaran yang rendah pula.

⁴⁶Sub Direktorat Analisis Statistik, *Op.Cit*, h.69

Apabila tidak terdapat keseimbangan diantara keduanya ini berarti masyarakat tersebut masih tergolong keluarga yang belum sejahtera karena penghasilan yang didapatkan belum seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Indikator kesejahteraan masyarakat Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmanai dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Menurut BPS (badan pusat Statistik) indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut

a. Kependudukan

Pembangunan dapat digambarkan sebagai suatu proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Pembangunan memerlukan berbagai sumber daya antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Salah satu sumber daya yang paling menentukan keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia yaitu penduduk, di samping juga aset atau sumber daya lainnya. Penduduk dalam hal ini diposisikan menjadi pelaku sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri.

Penduduk selain sebagai pendukung pembangunan, juga dapat menjadi penghambat proses pembangunan. Semakin banyak jumlah penduduk seharusnya semakin banyak pelaku pembangunan dan diharapkan juga akan memberikan *input*

pembangunan yang bernilai lebih. Jumlah penduduk yang banyak dan diikuti dengan kualitas yang baik, maka penduduk akan menunjang pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk banyak namun dengan kualitas yang minim hanya akan menghambat pembangunan.

b. Kesehatan

Tingkat kesehatan rakyat sebuah negara dapat dilihat dari angka umur harapan hidup (UHH). Tahun 2000 UHH rakyat Indonesia 65,6 tahun sementara itu tahun berikutnya 2001 naik menjadi 65,8, ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat mengalami perbaikan. Namun secara internasional UHH rakyat Indonesia masih rendah.⁴⁷

Pada tahun yang sama UHH rakyat Thailand 69,9 tahun, Malaysia 72,2 tahun, Singapura 77,4 tahun dan Jepang 80,8 tahun. Saat UHH Indonesia rendah berarti bahwa tingkat kesehatannya belum baik. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal, antara lain rendahnya akses pelayanan kesehatan, rendahnya akses air bersih, rendahnya gizi balita, mewabahnya penyakit menular dan lambannya penanganan kematian ibu melahirkan.⁴⁸

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses

⁴⁷BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2012, Katalog BPS : 3101013.63.03 , Hlm 27

⁴⁸*Ibid*, Hlm 27

belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender dan lokasi geografis.

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”⁴⁹.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Dalam beberapa tahun mendatang pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup (a)

⁴⁹Endik Arya Budi, “Kendala-Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Miskin Dalam Mengakses Pendidikan Formal”, Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 1: 63-71 63, Pada [Http//JurnalPemberdayaanMasyarakat.Com](http://JurnalPemberdayaanMasyarakat.Com) , Diakses Pada (23 Meret 2016) Hlm. 64

pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan.

d. Pendapatan masyarakat

Pendapatan atau penghasilan adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu biasanya terdapat perbedaan. Keadaan ini wajar terjadi karena setiap individu memiliki perbedaan keahlian dibidang masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu yang tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas millik (seperti sewa, bunga, dan deviden), serta tunjangan dari pemerintah.⁵⁰

e. Angkatan Kerja

Besarnya angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja. Sayangnya besarnya penawaran tersebut tidak disertai dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga sebagian angkatan kerja tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Kelebihan pasokan tenaga kerja dalam jumlah besar menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang serius dan tersebar

⁵⁰Paul A Samuelson Dan William D Nordhaus, *Ilmu Makroekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), Hlm. 417

luas yaitu: pengangguran, meledaknya sektor informal dan setengah pengangguran.

Masalah serius dalam ketenagakerjaan meliputi pengangguran, setengah pengangguran dan rendahnya kualitas tingkat hidup pekerja. Masalah ini sudah lama menjadi masalah serius dan tidak banyak berkurang selama 40 tahun pembangunan di Indonesia. Bahkan ketika terjadi “Keajaiban Ekonomi” (ekonomi tumbuh cepat dalam tahun sembilan-puluhan) struktur ekonomi yang timpang cenderung kurang membaik, sehingga kondisi ketenagakerjaan tidak banyak perubahan.⁵¹

Pemanfaatan SDM sebagai suatu manifestasi dari kualitas SDM lebih sering dilihat dalam dimensi tenaga kerja. Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan meliputi penciptaan lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang dapat memasuki pasar kerja.

f. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan permukiman selain merupakan kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang

⁵¹*Op. Cit*, BPS, Hlm. 30

layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan rumah dan lingkungan yang sehat dan nyaman. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Menurut Krieger and Higgins (2002), selain merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan, sehingga penghuninya tetap sehat. Perumahan yang sehat, nyaman dan asri adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya. Hal ini tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana terkait, seperti tersedianya fasilitas, penerangan, sumber air minum, tersedianya jamban, dan lantai yang memenuhi standar kesehatan.

Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan diatas maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan manusia yang lebih berkualitas. Indikator-indikator yang terus berkembang diharapkan mampu membawa korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu pembanguana manusia tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan pelaksanaannya harus berdasarkan pengorganisasian kerja yang berkembang

D. Konsep Islam Tentang Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan (Falah) Dalam Ekonomi Islam

Falah berasal dari bahasa Arab dari kata *qflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan kemenangan dalam hidup⁵². *Fala*, kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat yang memberikan dampak yang disebut *masalah* adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut As-Shabiti, *masalah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu, agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan material (*aealth*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna⁵³. Misi itulah yang sekaligus menjadi misi Rasulullah yang dinyatakan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An biyaa' (21):

107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

107. Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

⁵²Pusat Kajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2009, Hlm. 2

⁵³*Ibid*, Hlm 6

sejahtera adalah aman sentosa, makmur, damai, dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.⁵⁴ Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat sentosa, aman, damai. dari pengertian tersebut di pahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri ,dimaksud dalam ayat Al-Quran Al-anbiyya:21

أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۚ ٢١

21. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?⁵⁵

Difinisi Islam tentang kesejahteraan pada pandangan konferhensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian yaitu:⁵⁶

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sepirtual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan didunia dan diakhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi dialam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia ditujukan dalam rangka

⁵⁴ *Op. Cit*, W.J.S. Purwadaritma, Hlm.126

⁵⁵ Al- Quran Surat Al-Quranal-Anbiyya: 21

⁵⁶ *Op. Cit*, Pusat Pengkajian Dan Pembangunan Ekonomi Islam, Hlm.4

untuk memperoleh kecukupan diakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan diakhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibanding kehidupan dunia.

Dalam bentuk kesejahteraan perfektif Islam, tentu hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist, Al-Qur'an secara tegas sekali menyatakan, bahwa kebahagiaan itu tergantung kepada ada atau tidaknya hubungan manusia dengan Tuhanya dan dengan sesama manusia. Bahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis-garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok.⁵⁷

Syahminan Zaini dan Anytonio Kusuma serta menjelaskan , bahwa suksesnya tugas kekhalfahan itu minimal tujuh syarat harus di penuhi oleh manusia, yaitu:

- a. Badan kuat,
- b. Trampil,
- c. Pandai berhubungan dengan Allah (dalam bentuk ibadah), dengan manusia (dalam bentuk penelitian, pengelolaan, dan pemanfatanya)
- d. Beriman dan meramal shaleh

⁵⁷Surya Efendi, Skripsi, Upaya Pemerintahandesa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taman Rahayu Kecamatan Saetu Kabupaten Bekasi, Universitas Islam Negri Syafei Hidayatullah Jakarta, 2008, Hlm. 35

- e. Berilmu pengetahuan yang banyak dalam segala bidang kehidupan manusia.
- f. Sungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya kesungguhan melakukan semua itu.
- g. Berdisiplin tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kesejahteraan berdasarkan pandangan Islam yaitu adalah melaksanakan pembangunan jasmani dan rohani. Pembangunan jasmani meliputi 1) pembangunan kekuatan jasmani, 2) pembangunan kesehatan jasmani, 3) pembangunan keterampilan jasmani, 4) pembangunan keindahan jasmani. Pembangunan rohani yaitu, 1) pembangunan martabat manusia, 2) pembangunan fitrah manusia, 3) sifat-sifat manusia, 4) tanggung jawab manusia.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: 1) agama, 2) hidup atau jiwa, 3) keluarga atau keturunan, 4) harta atau kekayaan, 5) intelek atau akal. Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan di dunia ini dan di akhirat (*maslahah al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah *hierarki utilitas* individu dan sosial yang

tripartit meliputi kebutuhan pokok, kesenangan dan kenyamanan, dan kemewahan.⁵⁸

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, dan penyakit, serta kebodohan bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam AS, terdapat dalam Al-Quran surat At-Taha ayat 117-119

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْقَى ۚ ۱۱۷ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۚ ۱۱۸ وَأَنَّكَ لَا
تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۚ ۱۱۹

117. Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.

118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,

119. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".⁵⁹

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu.

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran
- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap perilaku ekonomi memiliki

⁵⁸Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 62

⁵⁹Al-Quran Surat Thahaa Ayat 117-119

tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang sebenarnya, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara peribadi atau kelompok tertentu saja.

- c. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antar individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder (*the dneed/haji*), maupun tersier (*the comendabel/tahsisi*), dan pelengkap (*the huxury/ kamili*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencangkup seluruh kebutuhan komplementer lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariat sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.⁶⁰

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan dapat dikendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak sodakoh. Dengan pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti sandang, pangan, papan dapat terpenuhi secara seimbang. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan

⁶⁰*Ibid*, Hlm 89

kehormatan manusia dengan demikian, kesejahteraan ekonomi Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.

Menurut Umar Chapra, hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan adalah sangat erat. Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak terlepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*)⁶¹. Hal tersebut merupakan definisi kesejahteraan menurut pandangan Islam.

Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk membangun fisik-material dari individu masyarakat dalam Negara saja, tetapi memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang merupakan juga elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Begitulah Al-Qur'an secara sempurna mendefinisikan tentang kesejahteraan, dimulai dari kesejahteraan individu-individu yang mempunyai tauhid yang kuat kemudian tercukupi kebutuhan dasarnya dan tidak berlebih-lebihan, sehingga suasana menjadi aman, nyaman dan tentram.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Indikator kesejahteraan masyarakat menurut Islam merujuk pada Al-Quran surat Al- Quraisy ayat 3-4

⁶¹M. B.HendrieAnto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta:Ekosiana 2003), hlm. 7

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ
خَوْفٍ ۚ

(3)Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).(4). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan⁶².

a. Menyembah Tuhan

Indikator kesejahteraan yang pertama dan paling utama Al-quran adalah” menyembah tuhan (pemilik) rumah (ka’bah), mengandung makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindungnya, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang khaik. Semua aktifitas kehidupan masyarakat berbingkai dalam aktivitas ibadah.

b. Menghilangkan Lapar

Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang yang lapar tersebut adalah Allah, jadi ditegaskan bahwa rizki berasal dari Allah, bekerja merupakan sarana dari Allah.

c. Menghilangkan Rasa Takut

membuat rasa aman, nyaman tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya masyarakat. Juga dimasyarakat masih banyak tindak kriminal seperti perampokan , pembunuhan dan kriminal tinggi

⁶²Al-Quran Surat Al- Quraisy Ayat 3-4

lainya, maka dapat diindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang soleh dan menjaga kesolehan merupakan bagian dari proses kesejahteraan masyarakat.

Indikator Pertanyaan

| Variabel | Teori | Indikator | Pertanyaan |
|------------------|--|--|---|
| Pemberdayaan (X) | Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karna pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan keputusan 2. Kepercayaan diri. 3. Kemampuan ekonomi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda merasa sudah mendapat keterampilan dalam mengembangkan usaha anda melalui program pemberdayaan oleh dinas sosial? 2. Apakah pengetahuan anda bertambah dalam meningkatkan usaha anda melalui pemberdayaan oleh dinas sosial 3. Apakah program pemberdayaan oleh dinas sosial ini dapat memberikan kemandirian dalam mendirikan usaha anda? 4. Apakah dengan adanya program pemberdayaan oleh dinas sosial kualitas hidup anda dan keluarga menjadi lebih bai dari pada sebelum adanya pemberdayaan? 5. Apakah program pemberdayaan dari dinas sosial ini dapat meningkatkan kepercayaan diri anda dalam berwirausaha? 6. Apakah Dengan dilakukannya pelatihan pemberdayaan oleh dinas sosial, anda merasa kemampuan dalam berwirausaha meningkat ? 7. Apakah anda merasa dapat mengembangkan potensi yang anda miliki melalui Program pemberdayaan yang di terapkan oleh dinas Sosial. ? |

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| Kesejahteraan (Y) | <p>Indikator kesejahteraan masyarakat Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmanai dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. menurut BPS (badan pusat Statistik) indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:</p> <p>pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu yang tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden), serta tunjangan dari pemerintah. Perumahan/ pemukiman, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan, sehingga penghuninya tetap sehat. Perumahan yang sehat, nyaman dan asri adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya. Kesehatan, adalah dinyatakan dengan indicator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan 2. Perumahan/ pemukiman 3. Kesehatan 4. pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. apakah dengan adanya program pemberdayaan UEP-KM oleh dinas Sosial penghasilan anda saat ini dapat memenuhi kebutuhan harian keluarga anda? 2. Dengan adanya program pemberdayaan UEP-KM oleh Dinas Sosial berapakah pendapatan anda dalam sebulan? 3. Apakah jenis lantai di rumah anda? 4. Apakah dengan adanya pemberdayaan UEP-KM oleh dinas Sosial ini anda memiliki fasilitas kamar mandi di rumah anda? 5. Dengan dijalankannya program pemberdayaan UEP-KM oleh dinas Sosial, apakah setatus rumah anda sekarang? 6. dengan dilaksanakannya program pemberdayaan UEP-KM oleh dinas sosial, saat ini apakah jenis penerangan di rumah anda? 7. Apakah dengan adany program pemberdayaan UEP-KM oleh Dinas Sosial ini anda dan keluarga mampu berobat secara medis ketika sakit? 8. Dengan adanya program pemberdayaan UEP-KM oleh dinas Sosial ini anda mampu membayar penuh untuk berobat? 9. Apakah dengan adanya program pemberdayaan oleh Dinas Sosial, sudah tersedianya sarana pendidikan di lingkungan anda? 10. Apakah anda memiliki anak usia sekolah? |
|-------------------|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>di rumah, setidaknya bila anggota keluarga sakit dapat dibawa ke puskesmas. Pendidikan adalah Pendidikan, mengenai pendidikan, mengenai pendidikan, pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Karakteristik pendidikan ini diwakili oleh komponen angka melek huruf dan rata-rata dalam sekolah</p> | | |
|--|--|--|--|